

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) KABUPATEN LANGKAT DALAM RANGKA  
MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) KABUPATEN LANGKAT  
PERIODE TAHUN 2016-2017**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**EDI BAHAGIA**

**NPM: 17 851 0054**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From Irepository.uma.ac.id 21/8/24

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



**Peranan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat  
Dalam angka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode  
Tahun (2016-2017)**

**ABSTRAK**

Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan direvisi menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Hal tersebut termasuk dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan melihat ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku, jurnal, laporan tahunan dan referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017 sangat besar dan penting sebab DPRD Kabupaten Langkat dalam melaksanakan fungsi anggaran tidak hanya sebatas bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Hambatan yang ada di DPRD Kabupaten Langkat dibagi menjadi 2 yaitu faktor intern yang berasal dari kapabilitas suatu lembaga yang internalnya mempengaruhi hal tersebut dan faktor ekstern yang berada diluar keanggotaan DPRD.

**Kata Kunci :** DPRD, Fungsi Anggaran, APBD Kabupaten Langkat

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat kepada kita sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan Baik, Adapun judul Skripsi penulis yaitu **“Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017”** merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tecinta yang selalu Memberikan Semangat, dan Memberikan doa yang tidak pernah henti Untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis di masa depan.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos M.IP selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Evy Kurniaty, S.Sos. MIP selaku Sekretaris dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.

7. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

8. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.



Medan, Agustus 2019  
Hormat Penulis

Edi Bahagia  
17.851.0054

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah ..... 5

1.3. Tujuan Penelitian..... 5

1.4. Manfaat Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 7

2.1. Pengertian Peranan..... 7

2.2. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) ..... 8

2.2.1 Fungsi Lembaga DPRD ..... 9

2.3. Pengertian Anggaran ..... 10

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..... 12

2.5. Kerangka Pemikiran ..... 13

BAB III METODE PENELITIAN..... 16

3.1 Jenis penelitian, Sifat Penelitian,Lokasi dan Waktu Penelitian..... 16

3.1.1 Jenis Penelitian ..... 16

3.1.2 Sifat Penelitian..... 16

3.1.3 Lokasi Penelitian..... 17

3.1.4 Waktu Penelitian.....	17
3.2 Informan Penelitian .....	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4 Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
4.1 Profil Kabupaten Langkat .....	22
4.2 DPRD Kabupaten Langkat .....	29
4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017 .....	45
4.4 Implementasi Peranan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Kabupaten Langkat.....	47
4.5 Faktor Hambatan dan Dukungan yang dihadapi oleh DPRD dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang secara jelas dan konkret yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah provinsi dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah), sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber konstitusional pemerintah daerah adalah Pasal 18 (1), Pasal 18 (2), Pasal 18 (3), perubahan pasal 18 baru ini untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebenarnya undang-undang memberi kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi dalam prakteknya fungsi yang sangat ini tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dilaksanakan setengah-setengah oleh DPRD, sebab utamanya adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dilingkungan daerah.

Fungsi DPRD yang juga sering diabaikan adalah fungsi anggarannya. DPRD dalam menjalankan fungsi ini sering terjebak pada kepentingan partai politik dan kelompok sehingga melupakan kepentingan masyarakat yang lebih utama dan besar. Tidak jarang kita mendengar penetapan anggaran pada suatu daerah mengalami keterlambatan dan perdebatan yang cukup alot, semua itu dikarenakan mereka lebih mementingkan kelompok dari pada kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas mengisyaratkan bahwa anggaran daerah merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan demikian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pasal 150 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini juga menjadi tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Langkat yang merupakan lembaga pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. APBD dalam prakteknya memiliki kedudukan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Langkat adalah salah satu unsur pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan posisi strategis. Keberlangsungan APBD di Kabupaten Langkat tentu sangat bergantung dari kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong mengambil judul **“PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LANGKAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LANGKAT PERIODE TAHUN 2016-2017”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah Sangat Penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kabupaten Langkat ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Agar mengetahui peranan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kabupaten Langkat.
2. Meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kabupaten Langkat dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Ahmad (2015: 188) Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka saat ini yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan mengenai peranan suatu organisasi atau lembaga pemerintah dalam hal memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Pada proposal skripsi ini peneliti berfokus pada peranan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017

##### **2. Secara Praktis**

Secara Praktis, yakni dapat memberikan data dan Informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati sejauh mana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Peranan**

Wirutomo dalam David Berry (1981: 99-101) bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya". Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan-peranan yang lain.

Adapun Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atassu kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Selain itu Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

## 2.2 Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rahman (2007: 123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang yang anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Budiardjo (2009: 315) Badan Legislatif, atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau yang membuat undang-undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan adalah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 2.2.1 Fungsi Lembaga DPRD

Menurut Calvin Mackenzie (1986: 120–137) dikutip dari Paimin (2005: 39–40) berpendapat bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yakni :

1. *Legislation*, adalah peran atau fungsi legislasi. Peran pembuatan undang-undang ini dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komperhensif, diskusi panjang, negoisasi, kompleks dan berbelit-belit/samar.
2. *Representation*, adalah peran/fungsi representatif. Pada fungsi semacam ini, perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah.
3. *Administrative oversight*, adalah peran/fungsi administratif. Mengawasi atau mengontrol adalah suatu tanggung jawab penting dari setiap badan Lembaga Perwakilan Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan administratif. Ini adalah proses dengan

mana lembaga legislatif mereview dan bila perlu mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki berbagai fungsi, yakni:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama- sama dengan kepala daerah.
3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### 2.3 Pengertian Anggaran

Anggaran (*Budgeting*) merupakan alat perencanaan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan di bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non-laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah. Hal ini menyangkut kepada manusia,

khususnya pada karyawan yang ada pada suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk memahami anggaran, maka pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan anggaran.

Menurut Munandar (2010:1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.

Gunawan Adisaputro (2010:02) mendefinisikan “Business Budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan pengawasan”.

Sedangkan menurut Nafarin (2011:11), mendefinisikan bahwa “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum anggaran merupakan suatu bentuk rencana aktivitas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode mendatang yang secara umum dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan angka-angka yang dibuat dengan pertimbangan yang komprehensif.

## 2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mamesah (Halim, 2007:19), APBD merupakan rencana operasional keuangan pemda, dan pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang tinggi, untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek di daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dari beberapa sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran yang dimaksud. Pada orde lama, telah dikemukakan oleh Wajong (Halim, 2007:19), APBD merupakan rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat agar suatu jangka waktu badan legislatif DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah), untuk melakukan pembiayaan demi kebutuhan rumah tangga daerah yang sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar dalam penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan agar dapat menutup pengeluaran yang berlebihan.

Menurut Halim (2007:19), adapun unsur-unsur anggaran daerah yaitu yang dirangkum menurut dua pengertian ahli sebelumnya.

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya yang secara rinci
- b. Terdapat sumber penerimaan yang merupakan suatu target terendah dalam menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan terdapat biaya yang merupakan batasan tertinggi pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang disampaikan dalam bentuk angka
- d. Dan memiliki periode anggaran selama satu tahun.

Dalam bentuk APBD yang baru, pendapatan juga dibagi menjadi tiga,

yaitu PAD, dana perimbangan, dan pendapatan Lain-lain daerah yang sah. Selain itu belanja dibagi menjadi empat, yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, juga belanja tidak terduga. Dalam belanja aparatur daerah dijabarkan menjadi tiga bagian, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu, belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, juga belanja modal. Pembiayaan telah dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu terdapat sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan merupakan sumber sisa lebih dari anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, juga terdapat transfer dari cadangan. Sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dalam dana cadangan, dan sisa anggaran tahun yang sedang berlangsung (Halim, 2007:22-23).

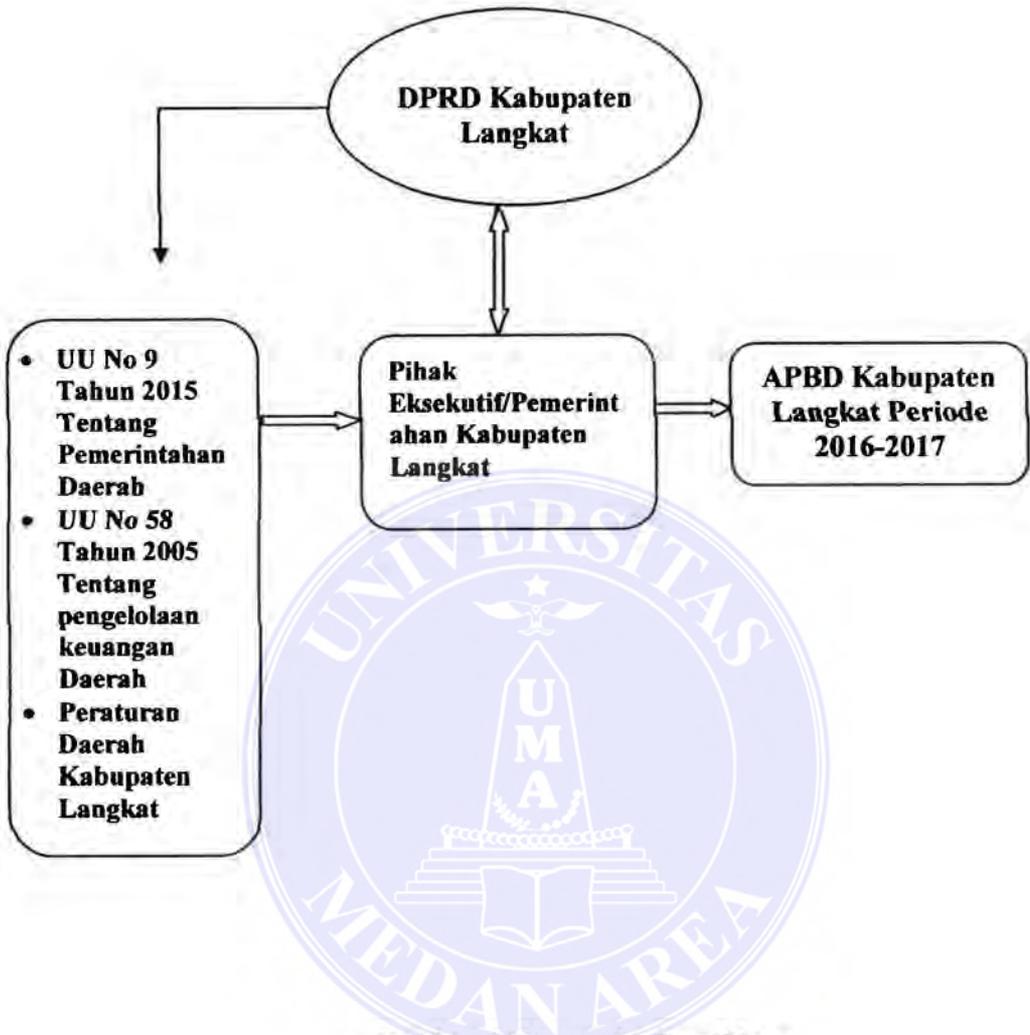
## 2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep untuk melakukan penelitian, dengan adanya kerangka pemikiran maka hasil penelitian yang dilakukan dilapangan tidak bertolak belakang dengan judul penelitian. Dalam melaksanakan fungsi Anggaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat tentu mempunyai peranan yang sangat penting

dalam hal ini. Untuk melihat sejauh mana tingkat peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten langkat dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten langkat periode tahun 2016-2017, penulis mengacu kepada teori Levinson dalam soekanto (2009:213) mengatakan peranan harus mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dikembangkan penulis secara sistematis.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

##### **3.1.2 Sifat penelitian**

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk

tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomea.

**3.1.3 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang beralamat di jalan T. Amir Hamzah No. 2 Stabat, Sumatera Utara

**3.1.4 Waktu penelitian**

Dalam proposal Skripsi ni, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian Kegiatan	Desember 2017				Januari 2017				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal								■																
3	perbaikan proposal											■	■												
4	Penelitian													■	■	■	■								
5	Penyusunan Skripsi																				■				
6	Seminar Hasil																						■	■	
7	Perbaikan Skripsi																							■	■
8	Sidang Meja Hijau																								■

Sumber : dikelola oleh penulis

### 3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat.
2. Informan Utama dalam Penelitian ini yaitu anggota Banggar(Badan Anggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat.
3. Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah kabupaten langkat.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan

sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segiacara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan), dan dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Menurut Juliansyah Noor (2012: 138) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

Menurut Sugiyono (2014:231) wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus dieliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

#### 2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014: 145) mengatakan bahwa,

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*Triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

## 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

## 2. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 249) menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan *tex* yang bersifat naratif.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya Sugiyono (2005: 125).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada Bab IV, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode 2016-2017 sangat besar dan penting sebab DPRD Kabupaten Langkat tidak hanya sebatas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Hal ini dikarenakan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 150 huruf (a), (b), (c), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tanpa peran DPRD dalam fungsi anggaran maka APBD tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan sebab hal itu berarti tidak ada persetujuan antara eksekutif dengan legislatif.
2. Berdasarkan uraian hambatan yang ada di DPRD Kabupaten Langkat, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu

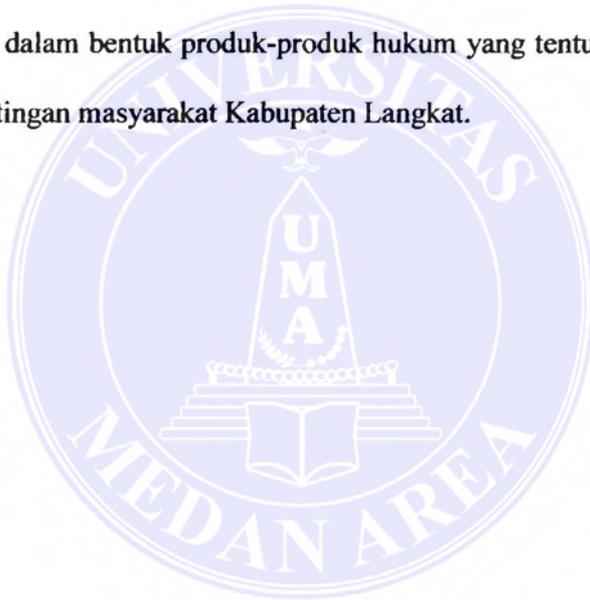
intern yang berasal dari kapabilitas suatu lembaga yang internalnya mempengaruhi hal tersebut. Misalnya: Sumber Daya Manusia, Silang Pendapat Antar Fraksi, Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat, Sarana Prasarana Anggota DPRD, Kemudian Faktor Ekstern adalah faktor yang berada diluar keanggotaan DPRD yang dapat menjadi hambatan. Misalnya: Pola Rekrutmen Anggota Legislatif yang Feodal dan Kesadaran Politik Masyarakat yang Relatif Masih Rendah.

## 5.2. Saran

Saran yang penulis berikan khususnya terhadap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Langkat pada umumnya adalah:

1. Hendaknya DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus selalu bersikap profesional dan selalu berpegang teguh pada kode etik Anggota DPRD dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.
2. DPRD kedepannya harus menguatkan kualitas sumber daya manusia lebih diutamakan dan integritas sebagai anggota dewan. DPRD dipilih bukan sebagai wakil partai politik, tetapi DPRD dipilih sebagai wakil dari rakyat.
3. DPRD harus lebih berperan aktif dan mengedepankan sikap rendah hati dalam melaksanakan fungsi anggaran, karena semua kebijakan yang dibuat kembali untuk dan atas nama rakyat

4. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya lebih sering bertukar pikiran (*sharing*) dan berkomunikasi serta menyatukan pikiran dan pandangan tentang tugas, kewenangan, fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban DPRD dan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
5. Komitmen sebagai wakil rakyat untuk mengabdikan dan turut membangun Kabupaten Langkat selama periode 2014-2019 akan selalu ditunggu oleh masyarakat dalam bentuk produk-produk hukum yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmadi dan Narkubo. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- A, Rahman, H.I.2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Napitulu, Paimin, 2005. *Peran dan Tanggung jawab DPR. Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*. PT. Alumni. Bandung
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Munandar, 2010. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kejadan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada
- Adisaputro, Gunawan, 2010. *Manajemen Pemasaran analisis untuk perancangan strategi pemasaran*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- M Nafarin, 2012, *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim, 2007. *Seri Bunga Rampai: Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Noor Juliansyah, 2011. *Metodologi penelitian Bandung*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Terbuka
- Soekanto, Soejono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_ 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.